



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDHA WIDI ARSANTI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 170690

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m²/210 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m²/180 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m²/231 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/72 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 956.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
3. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOTOR, YAMAHA YAMAHA VEGA ZR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2,5 G AT Tahun 2020, HASIL



SENDIRI	Rp. 600.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	105.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	1.050.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	8.861.000.000
III. HUTANG		Rp.	900.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	7.961.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.